

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA**

(Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama: William Cornelius Atohema Jacobs

NIM : 15.400.501.01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2019

VISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada Tahun 2034.

MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA**

(Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama: William Cornelius Atohema Jacobs

NIM : 15.400.501.01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

(Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas
Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama: William Cornelius Atohema Jacobs

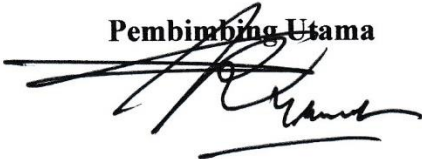
NIM: 15.400.501.01

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

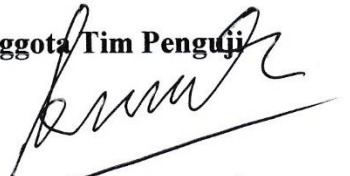
Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



(Poltak Siringo-Ringo, S.H.,M.H)

Anggota Tim Penguji



(T. Vaison Sahaan, S.H.,MH)

Pembimbing Pendamping



(Ika Darmika, S.H.,M.H)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama: William Cornelius Atohema Jacobs

NIM: 15.400.501.01

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

(Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Disetujui,

Pembimbing I



(Poltak Siringo-ringo, SH.,MH.)

Pembimbing II



(Ika Darmika, SH., MH)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Analisis perkara No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini adapun hambatan seperti sulitnya mendapatkan putusan yang sesuai tetapi Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat sampai pada akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Yth. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA** selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. **Yth. Wilson Rajaguguk, M.Si., MA** selaku Wakil Bidang Akademik Rektor Universitas Kristen Indonesia. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawanya.
3. **Yth. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. **Yth. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. **Yth. Bapak Poltak Siringo-ringo, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, Yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. **Yth. Ibu Ika Darmaika, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Yth. Para Dosen Fakultas Hukum Unversitas Kristen Indonesia.
8. Untuk Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu penulis bertrimakasih atas semua ilmu yang dikasih dan tanggung jawab sebagai anggota Peradilan Semu.

9. Untuk Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, trimakasih.
11. Untuk Keluarga besar yang sangat penulis sayangi di Medan dan di Sangir, penulis ucapkan trimakasih banyak atas dukungannya selama ini akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Bapak dan Mama yang sangat penulis sayangi dan yang telah melahirkan dan mengasuh dengan segala kasih sayangnya serta memberikan segala materi mulai penulis masuk keperguruan tinggi hingga selesai skripsi ini.
13. Om yang selalu menolong dan memberi semangat kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk teman-teman penulis yang selalu support, sahabat, terutama teman-teman Kelas D trimakasih atas dukungan kalian semua berkat kalian penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan umumnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Indonesia. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

febuari 2019

Jakarta, 13

Penulis,

(William Cornelius

Atohem jacobs)

ABSTRAK

Nama : William Cornelius Atohema Jacobs

Program Studi : Hukum

Judul : Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

(Analisis perkara No : 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Tujuan Penulisan ini adalah pengaturan tentang tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi beserta undang-undang tindak pidana korupsi dan penerapan ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam praktek peradilan khususnya dalam perkara No. 11/ Pidsus-TPK/ 2018/ PN.JKT PST.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, meliputi bahan primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan penafsiran menurut ilmu hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga bantuan dari masyarakat sangat diperlukan seperti pelaporan karena Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu Tindak pidana yang luar biasa.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi

Dosen Pembimbing:

1. Poltak Siringo-ringo, S.H.,M.H
2. Ika Darmika, S.H.,M.H

ABSTRACT

Name : William Cornelius Atohema Jacobs
Study Program : Law
Title : Tasks and Authorities of the Corruption Eradication Commission
in the Criminal Case Examination Process
(Analysis case No: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

The purpose of this writing is the regulation of the duties and authorities of the corruption eradication commission along with the law on corruption and the application of the provisions of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in judicial practice especially in case No. 11 / Pidsus-TPK / 2018 / PN.JKT PST.

This study uses a normative juridical legal research method that is legal research that prioritizes secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method used is a qualitative method using interpretation according to legal science.

The conclusion of this study is that the Task and Authority of the Corruption Eradication Commission has gone well in accordance with Law No.30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and also assistance from the community is very much needed such as reporting because Corruption is one of the most extraordinary criminal offenses .

Keywords: Corruption Eradication Commission, Corruption

Supervisor:

1. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H
2. Ika Darmika, S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DATAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup Penelitian	18
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	18
E. Metode Penelitian	19
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tindak Pidana Korupsi.....	27
1.1 Fase Zaman Kerajaan.....	27
1.2 Fase Zaman Penjajahan	28
1.3 Fase Zaman Modern	29
B. Pemahaman konseptual tentang makna korupsi	29
C. Sifat Korupsi	34
2.1 Korupsi yang Bermotif Terselubung	34
2.2 Korupsi yang Bermotif Ganda.....	34
D. Faktor Penyebab Korupsi dan Unsur-Unsurnya	35
3.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut.	35
3.2 Unsur-Unsur Korupsi.....	43

E. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	44
F. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	47
G. Secara Umum	49
H. Bidang Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.....	53
I. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	54
J. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi	60
K. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan.....	60
5.1 Penyelidikan.....	61
5.2 Penyidikan	62
5.3 Penuntutan	63
 BAB III	 64
Pengaturan tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	64
A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	64
B. Ketetapan MPR dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971	65
1.1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998.....	65
1.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971	67
C. Rumusan Tindak Pidana Korupsi.....	69
2.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	73
2.2. Alat bukti yang sah (Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001)	76
D. Beberapa Perubahan Substansial dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	85
E. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	89
 BAB IV	 94
Penerapan dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi	94
A. Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	94
B. Analisis Putusan No. 11/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN.JKT.PST	98
1.1 Kasus Posisi	98
1.2 Dakwaan	102
1.3 Tuntutan Penuntut Umum.....	115
1.4 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	116

1.5	Putusan Hakim.....	165
C.	Analisis Penulis tentang Penerapan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	182
BAB V.....		189
PENUTUP.....		189
A.	KESIMPULAN	189
B.	SARAN	190
DAFTAR PUSTAKA		